

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan dan urgensi penelitian yang meliputi (a) Latar Belakang Masalah, (b) Identifikasi Masalah, (c) Rumusan Masalah, (d) Tujuan Penelitian, (e) Manfaat Penelitian, (f) Definisi Istilah dan (g) Sistematika Penulisan

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pelaksanaan pendidikan di Indonesia hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan berkembangnya potensi peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003). Pendidikan juga berorientasi mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen dan kesetiaan untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang selaras dengan cita-cita dalam rumusan mukadimah UUD 1945, yakni Indonesia yang sejahtera lahir batin. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bidang studi wajib dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mendidik Warga Negara yang baik *smart and good citizen* memiliki peranan yang strategis untuk mempertahankan NKRI. Pramuka sebagai gerakan kepanduan yang berideologi monoloyalitas terhadap ideologi Negara sudah selayaknya menjadi ekstrakurikuler wajib yang dapat bersinergi dengan PKn untuk menumbuhkembangkan semangat nasionalisme dalam rangka mempertahankan eksistensi NKRI.

Salah satu upaya untuk menumbuhkan komitmen yang tinggi terhadap negara dan bangsa adalah dengan membangun semangat kebangsaan atau nasionalisme. Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI mencantumkan bahwa sebagai negara bangsa yang modern, Indonesia terbentuk atas dasar semangat kebangsaan atau nasionalisme, yakni semangat masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama, walaupun berasal dari agama, ras, etnik atau golongan yang berbeda-beda. Semangat kebangsaan atau nasionalisme

**Budiono, 2018**  
*KONSTRUKSI PENDIDIKAN PRAMUKA BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MENGEMBANGKAN SIKAP NASIONALISME*

bangsa Indonesia bukanlah paham nasionalisme yang sempit atau *chauvinism* yang mengagung-agungkan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain.

Selaras dengan hal tersebut Soekarno (1963) menyatakan bahwa nasionalisme yang sejati adalah nasionalisme yang bukan semata-mata merupakan ‘*copie*’ atau tiruan dari nasionalisme Barat, akan tetapi nasionalisme yang timbul dari rasa cinta akan manusia dan kemanusiaan. Ditegaskan pula bahwa bangkitnya nasionalisme Asia dan khususnya nasionalisme di Indonesia, berbeda dengan timbulnya nasionalisme di Eropa. Nasionalisme di Indonesia erat kaitannya dengan kolonialisme Belanda yang sudah beberapa abad lamanya berkuasa di bumi Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, Abdulgani (1964) menyatakan: “Nasionalisme Indonesia merupakan reaksi terhadap kolonialisme, karena apa yang dikehendaki oleh bangsa Indonesia melalui suatu kebangkitan adalah untuk dapat menenyapkan berbagai bentuk kekuasaan penjajah. Untuk itu, semangat dan komitmen yang kuat terhadap bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) harus selalu ditumbuhkembangkan secara terus-menerus pada generasi muda selaku penerus agar cita-cita bangsa sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 dapat tercapai”.

Dalam konteks dinamika masyarakat saat ini, nilai-nilai nasionalisme sebagai jati diri bangsa haruslah selalu ditanamkan, mengingat derasnya pengaruh globalisasi yang tidak selalu berdampak positif terhadap pertumbuhan bangsa Indonesia. Anderson (2001) menyatakan bahwa dewasa ini bangsa Indonesia disinyalir telah mengalami ‘defisit nasionalisme’ yakni berkurangnya semangat nasional, lebih-lebih dikalangan mereka yang mapan secara ekonomi dan berpendidikan. Hal tersebut tentunya merupakan sebuah ironi, karena penurunan semangat nasionalisme justru terjadi dikalangan masyarakat berpendidikan, yang seharusnya menjadi model dalam mengajarkan nilai-nilai nasionalisme.

Maraknya konflik diberbagai daerah pasca reformasi merupakan indikator tentang pudarnya semangat nasionalisme bangsa ini. Suatu keniscayaan bahwa

**Budiono, 2018**

**KONSTRUKSI PENDIDIKAN PRAMUKA BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MENGEMBANGKAN SIKAP NASIONALISME**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

nasionalisme terancam retak oleh datangnya berbagai krisis yang melanda bangsa ini semacam krisis moneter, krisis sosial, krisis politik, dan krisis multidimensi yang disebabkan oleh berbagai masalah sosial kemasyarakatan yang menempatkan kepentingan kelompok atau golongan di atas kepentingan nasional. Konflik vertikal antara pemerintah pusat dengan kelompok-kelompok yang tidak loyal terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mulai menyeruak di beberapa daerah seperti di Aceh, Maluku, Papua dan pulau besar lainnya, dan menjadi ancaman besar bagi integritas Nasional. Supardan (2011) mengatakan bahwa nasionalisme Indonesia masa kini sedang mengalami degradasi sebagai akibat meningkatnya konflik-konflik antar etnik, antar agama, dan fenomena disintegrasi bangsa lainnya. Konflik horizontal yang berlatar belakang SARA yang terjadi di Poso, Ambon, Sampit, Sambas dan di berbagai daerah konflik yang lain merupakan bukti nyata bahwa paham primordialisme telah mengemuka dan mengalahkan kepentingan nasional yang seharusnya berada di atas kepentingan pribadi atau golongan. Digulirkannya kebijakan Otonomi Daerah Tahun 1999 lebih menyuburkan tumbuhnya primordialisme yang mengarah pada sikap egoisme kelompok dan kedaerahan. Dikatakannya pula bahwa konflik antaretnik dan antaragama yang terjadi di Indonesia pasca runtuhnya Pemerintahan Orde Baru tahun 1998 merupakan indikator bahwa slogan stabilitas nasional yang selalu dikedepankan untuk menjamin kesatuan dan persatuan belum membumi di hati bangsa Indonesia.

Indikasi degradasi nasionalisme atau yang diistilahkan oleh Anderson (2001) dengan *defisit nasionalisme* ditandai pula oleh semakin maraknya fenomena konflik antar suku yang dipicu oleh tingginya etnisitas, yang sekaligus menunjukkan rendahnya nasionalisme masyarakat. Konflik-konflik berkepanjangan yang terjadi di berbagai pulau besar seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian, Sumatera, atau pulau lainnya sering berbuntut pilihan bagi penduduk untuk bertahan tinggal ataukah mengungsi meninggalkan wilayah tempat tinggal mereka yang telah berubah menjadi daerah konflik.

**Budiono, 2018**

*KONSTRUKSI PENDIDIKAN PRAMUKA BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MENGEMBANGKAN SIKAP NASIONALISME*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Indikator rendahnya nasionalisme juga ditandai oleh adanya banyak fenomena perkelahian di kalangan mahasiswa yang timbul karena dipicu ‘ketidakpedulian’ terhadap jati diri bangsa. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual dan kader bangsa yang seharusnya dapat menjadi contoh bagi generasi muda dalam berfikir dan bertindak secara tepat dalam lingkungan masyarakatnya, dan dinilai dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara yang rasional dan menghindarkan perkelahian fisik yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, justru banyak memunculkan perkelahian atau kekerasan yang cenderung merusak citra korps atau kampus. Sebagai contoh, perkelahian yang terjadi di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang dilakukan oleh mahasiswa IPDN yang notabene inputnya adalah pelajar pilihan representasi dari berbagai daerah diseluruh Indonesia dan dididik sebagai calon pemimpin bangsa, ironisnya justru menjadi ‘pioner’ dalam memunculkan perkelahian yang berbuntut terenggutnya sebuah nyawa. Inu Kencana Syafei, dosen senior di (IPDN) menyatakan bahwa sejak 1993-2007 siswa (praja) yang meninggal di I IPDN atau yang dulu disebut STPDN berjumlah 35 orang, tiga orang di antaranya meninggal secara misterius, dan 18 orang lainnya meninggal secara tidak wajar (*Harian Pelita*, 2015, 1 Juni).

Di samping berbagai konflik, rendahnya nasionalisme bangsa juga tercermin melalui timbulnya berbagai krisis multidimensi yang berkepanjangan, yang memicu terjadinya berbagai kerusuhan berlatar belakang SARA dan berdampak sangat merugikan keberadaan bangsa. Krisis moneter yang terjadi pada tiga dasawarsa terakhir yang memicu terjadinya krisis multidimensi dan diikuti munculnya tindak kekerasan, intoleransi dan semangat membesar-besarkan perbedaan merupakan tantangan besar bagi bangsa Indonesia dalam mempertahankan eksistensinya sebagai negara bangsa (*Nation State*).

Menyeruaknya kelompok sparatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Republik Maluku Selatan (RMS) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) juga menandai adanya degradasi nasionalisme, sekaligus merupakan ancaman besar bagi integritas NKRI. Dikatakan oleh Supardan (2011) bahwa serangkaian

**Budiono, 2018**  
*KONSTRUKSI PENDIDIKAN PRAMUKA BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MENGEMBANGKAN SIKAP NASIONALISME*

konflik yang saling berkelindan dengan latar belakang perbedaan agama dan etnik, yang terjadi di banyak wilayah di Indonesia merupakan indikator adanya degradasi nasionalisme. Disadari atau tidak, dewasa ini disamping dapat ditengarai melalui maraknya konflik vertikal maupun horizontal yang terjadi di berbagai daerah, penurunan rasa nasionalisme bangsa juga terjadi karena adanya perubahan pandangan dan penyikapan tentang nasionalisme.

Nasionalisme sebagai *basic drive* atau kemampuan dasar dan nasionalisme sebagai *elan vital* atau daya juang bangsa Indonesia juga sedang diuji kemampuannya dalam menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Fukuyama (2004) mengatakan bahwa di negara-negara demokrasi, nasionalisme bukan lagi merupakan perekat untuk menjalin kekuatan kebangsaan dalam arti sebagai ‘potensi untuk melawan musuh bersama’ seperti dimasa dahulu. Desakan globalisasi tidak mungkin dihadapi secara konfrontatif, tetapi harus disadari bahwa hal tersebut tidak boleh merusak sendi-sendi kehidupan bangsa yang sudah menjadi hak dan kewajiban setiap bangsa. Pengaruh negatif globalisasi yang akan mengancam masa depan nasionalisme tentunya harus disikapi secara tepat.

Kenichi Ohmae (1995) mengatakan bahwa negara bangsa (*nation State*) akan berakhir dan digantikan dengan negara regional ekonomis, yang digambarkan tidak lagi memerlukan nasionalisme suatu bangsa, melainkan hanya memerlukan persekutuan regional secara ekonomis. Orientasi warga bangsa bukan lagi untuk mempunyai negara bangsa sebagai rumah bersama dalam kebhinnekaan, tetapi lebih memilih rumah bersama secara ekonomis. Ohmae juga menegaskan bahwa unsur pemersatu bangsa yang dominan adalah faktor ekonomi. Hal tersebut tentunya tidak seratus persen dapat dibenarkan, namun untuk menjamin tetap tegaknya sebuah negara bangsa, tentunya semangat kebangsaan penting untuk selalu ditumbuhkan.

Di samping akibat maraknya konflik vertikal maupun horizontal yang terjadi diberbagai daerah, penurunan semangat nasionalisme juga dipicu oleh semakin pudarnya kepedulian terhadap simbol-simbol persatuan dan kesatuan bangsa.

**Budiono, 2018**

**KONSTRUKSI PENDIDIKAN PRAMUKA BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MENGEMBANGKAN SIKAP NASIONALISME**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Bentuk ketidakpedulian tersebut tampak dalam penyikapan terhadap peringatan hari-hari besar nasional sebagai simbol tonggak berdirinya sejarah bangsa yang mulai tampak dilupakan. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei, Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, Hari Pahlawan 10 Nopember, dan hari besar lainnya tidak lagi diperingati dengan pemasangan bendera di setiap rumah warga negara, walaupun ada yang memeringati hanya sebagian kecil dari instansi pemerintah dengan upacara bendera dilingkungan masing-masing.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa secara perlahan bangsa ini telah melupakan hari-hari bersejarah yang memberimakna besar bagi lahirnya negara Indonesia. Bukan hal yang mustahil, jika saat membuka pelajaran, seorang guru bertanya pada siswa tentang peringatan hari besar nasional, banyak siswa yang tidak dapat menjawabnya. Padahal, seandainya saat peringatan hari besar nasional ada instruksi dari pemerintah untuk mengibarkan bendera nasional di setiap rumah warga, sebagaimana dilakukan sebelum era reformasi, tentunya masyarakat akan meresponnya secara positif dan melaksanakannya. Jika hal tersebut dibiasakan secara tidak langsung dapat dijadikan wahana penanaman nilai-nilai untuk membangun jati diri dan identitas kepribadian bangsa sebagai pribadi yang berkesadaran tinggi dan menghargai sejarah bangsa.

Dalam dinamikanya, potret sikap nasionalisme dikalangan generasi saat ini memerlukan pencermatan kembali. Nasionalisme seakan tenggelam dalam pola pikir barat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan dan menjadikan kebebasan sebagai sesuatu yang didewa-dewakan. Pembiasaan makna dan nilai-nilai demokrasi yang cenderung disalahartikan dengan makna kebebasan dan pemenuhan hak azasi dijadikan sebagai dalih pembenar bagi suatu tindakan atau gerakan. Nasionalisme diuji pula oleh pola hidup individualisme, hedonisme, konsumerisme, materialisme, dan sikap permisif terhadap penyimpangan-penyimpangan sosial yang ada, tampak telah menjadi gaya hidup sebagian generasi muda.

**Budiono, 2018**

*KONSTRUKSI PENDIDIKAN PRAMUKA BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MENGEMBANGKAN SIKAP NASIONALISME*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Nasionalisme masyarakat luas pun patut dipertanyakan. Setiap terjadi perbedaan pendapat antara kepentingan kelompok dengan kebijakan pemerintah, saat fungsi wakil rakyat sebagai saluran aspirasi masyarakat tidak berjalan secara optimal, lembaga legislatif yang seharusnya berperan sebagai fungsi kontrol dan penyeimbang antara kepentingan rakyat dan pemerintah, tidak berperan dengan semestinya. Unjuk rasa, protes atau demo sering menjadi pilihan penyelesaian suatu masalah, dan tidak sedikit yang mengarah pada tindakan anarki dan mengganggu kepentingan umum. Semua fenomena tersebut tentunya juga menandai terkikisnya nilai nasionalisme pada bangsa ini.

Sebagai idiom, Globalisasi dimaknai sebagai kecenderungan perubahan yang berlaku luas dan mendunia. Hal tersebut menggambarkan bahwa setiap perubahan tidak lagi bersifat lokal tetapi selalu terkait dengan dunia tanpa batas. Meskipun demikian, penanaman nilai selazimnya tidak meninggalkan nilai-nilai lokal yang merupakan identitas pribadi bangsa yang menjadi dasar terbentuknya identitas nasional bangsa Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, penting artinya untuk membangkitkan kembali rasa kebangsaan atau nasionalisme. Bukan nasionalisme dalam bentuk awal seperti seabad yang lalu, melainkan nasionalisme yang diarahkan untuk mengatasi semua permasalahan bangsa, yang mampu mendidik warga negara bagaimana bersikap jujur, adil, disiplin, demokratis, toleran, kerja keras, berani melawan kesewenang-wenangan dan tidak korup demi mempertahankan eksistensi bangsa dan negara dan menunjukkan tanggungjawab atas keutuhan NKRI. Dengan istilah lain nilai nasionalisme yang dikembangkan adalah nilai nasionalisme yang selalu hidup dalam metamorfosisnya yang sesuai dengan tuntutan perubahan zaman.

Terkait dengan hal tersebut, Anderson (2001) menegaskan pentingnya menumbuhkan kembali semangat nasionalisme sebagaimana yang dulu hidup secara nyata di kalangan para pejuang pergerakan. Diusulkannya agar semangat nasionalisme yang ditanamkan adalah nasionalisme kerakyatan yang tidak bersifat *elitis* melainkan yang memihak pada masyarakat luas, khususnya rakyat yang lemah dan terpinggirkan. Dijelaskannya pula bahwa jalur pendidikan dinilai

**Budiono, 2018**  
*KONSTRUKSI PENDIDIKAN PRAMUKA BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MENGEMBANGKAN SIKAP NASIONALISME*

sebagai jalur yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat dan memegang peran strategis dalam membina setiap warganegara Indonesia sebagai generasi muda dengan semangat nasionalisme yang tetap tertanam.

Pendidikan saat ini hanya menekankan *the cultural of survival* belum *the cultural of liberation* dalam arti berorientasi hanya untuk memberdayakan dan belum memerdekakan. Penilaian tersebut muncul karena pendidikan terlihat lebih banyak memberikan penekanan pada aspek kognitif semata, dan belum intens merambah pada aspek psikomotorik, maupun afeksinya. Dalam arti belum banyak menyinggung pada pembentukan nilai dan moral. Jika karakteristik pendidikan tidak dilandasi oleh nilai dan moral, tentunya orientasi pendidikan untuk membangun manusia seutuhnya dan memanusiakan manusia hanya akan melahirkan manusia intelektual dan manusia ekonomi (*homo economicus*) semata. Pengakuan nilai kemanusiaan akan semakin menipis dalam pendidikan, karena lemah dan minimnya pendidikan nilai yang mengajarkan anak didik untuk berempati pada sesama. Sementara, pemberlakuan Undang-undang No.20 Tahun 2003 (Sisdiknas, pasal 3) tentang tujuan pendidikan nasional, menuntut pendidikan untuk mampu menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional.

Terkait dengan kualitas SDM, Mulyasa (2007) menyatakan bahwa pendidikan harus mampu menghasilkan lulusan yang mampu berpikir global (*global thinking*), mampu bertindak lokal (*act locally*) yang dilandasi oleh akhlak yang mulia (*akhlakul karimah*). Oleh karena itu, tidak selayaknya jika pendidikan hanya terfokus pada kebutuhan material jangka pendek sebagaimana banyak dipraktikkan saat ini, melainkan harus dapat menyentuh visi dan misi pendidikan, yakni perhatian mendalam pada etika moral dan spiritual luhur. Guna mewujudkan cita-cita menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa berkualitas yang berkarakter, berkebudayaan, dan beradab, peran strategis sekolah sebagai salah satu wahana mewujudkan tujuan tersebut pendidikan nasional tersebut harus berperan sebagai pusat pembudayaannya.

**Budiono, 2018**

**KONSTRUKSI PENDIDIKAN PRAMUKA BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MENGEMBANGKAN SIKAP NASIONALISME**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pelaksanaan pendidikan, baik dilaksanakan secara formal di sekolah maupun melalui pendidikan non formal di luar sekolah, hakikatnya berorientasi pada terjadinya proses perubahan tingkah laku peserta didik ke arah yang positif, selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran. Perubahan perilaku yang dimaksud mencakup keseluruhan ranah atau domain afektif, kognitif, dan psikomotorik. Perkembangan dalam ranah afektif berkaitan dengan perkembangan sikap dan aspirasi peserta didik dalam lingkungannya, yang diperoleh melalui tahapan penerimaan stimulus-respons, penilaian, pengorganisasian, dan karakterisasi diri dalam menghadapi stimulus dari lingkungan (Dimiyati, 2013).

Perkembangan ranah kognitif terkait dengan kecakapan peserta didik yang diperoleh melalui pengetahuan, pemahaman, penggunaan, analisis, sintesis, dan evaluasi terhadap sesuatu berdasarkan azas-azas dan fungsi keilmuan, sedangkan pengembangan ranah afeksi berupa kecakapan yang cenderung dikaitkan dengan aspek-aspek emosi seperti penghargaan, nilai, perasaan, semangat, minat, dan sikap terhadap sesuatu, yang dalam perwujudannya dapat dikaitkan dengan respon emosional dalam menyikapi tugas yang meliputi penerimaan, responsi, penilaian, organisasi, dan karakterisasi. Adapun perkembangan ranah psikomotorik atau *skills* menyangkut penguasaan dan penggunaan suatu keterampilan melalui tahapan rangsangan, kesiapan merespons, bimbingan dalam melakukan respons, gerakan mekanik, respons yang lebih kompleks, adaptasi, dan kemampuan melakukan sesuatu secara mandiri. Hakikatnya, perubahan tingkah laku peserta didik dalam ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik merupakan representasi hasil dari proses pembelajaran yang telah dirancang, direncanakan, dan diorganisasikan dengan orientasi akhir perubahan sikap dan perilaku positif peserta didik (Winkel, 2009).

Dalam konteks pendidikan formal, hakikatnya perubahan sikap dan perilaku positif peserta didik dapat dibangun dan dikembangkan melalui pembelajaran intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Melalui kedua bentuk pembelajaran tersebut, kemampuan, bakat, dan potensi peserta didik dapat dikembangkan dan pencapaian tujuan pendidikan nasional dapat diwujudkan.

**Budiono, 2018**  
*KONSTRUKSI PENDIDIKAN PRAMUKA BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MENGEMBANGKAN SIKAP NASIONALISME*

Pendidikan kepramukaan merupakan salah satu ekstrakurikuler yang berorientasi untuk mengembangkan ranah kognitif, afektif dan psikomotor secara berimbang. Oleh karena itu, pendidikan kepramukaan ditetapkan sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diberlakukan wajib pada pendidikan dasar dan menengah (Permendikbud No. 63 Tahun 2014).

Termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka bahwa tujuan pendidikan Pramuka sebagaimana disebutkan dalam pasal (4) adalah membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Relevan dengan Undang-undang tersebut, dalam AD/ART Gerakan Pramuka Pasal 3 juga dipaparkan bahwa Azas Gerakan Pramuka antara lain menjadikan Praja Pramuka sebagai warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri, dan bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa dan negara, serta memiliki kepedulian terhadap sesama makhluk hidup dan alam lingkungan.

Hakikatnya, rumusan azas tersebut merupakan muara bagi upaya pembentukan karakter unggul setiap praja pramuka dalam konteks perannya terhadap eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang secara otomatis berkaitan erat dengan tujuan membangun semangat kebangsaan dalam wujud patriotisme maupun nasionalisme. Hal tersebut juga dipertegas dalam salah satu rumusan tujuan yakni membentuk jiwa patriotik kader bangsa dalam menjaga dan membangun NKRI. Dalam konteks negara yang merdeka dan berada pada masa damai, ekspresi jiwa patriotik sebagai wujud nilai nasionalisme dalam implementasinya cenderung berupa komitmen warganegara untuk menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal (5) AD/ART Gerakan Pramuka menyebutkan bahwa pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan

**Budiono, 2018**  
*KONSTRUKSI PENDIDIKAN PRAMUKA BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MENGEMBANGKAN SIKAP NASIONALISME*

nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka Indonesia.

Adapun maksud nilai dan dasar kecakapan hidup pramuka tersebut dijabarkan dalam pasal (8) yang berbunyi 1) nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup (a) keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) kecintaan pada alam dan sesama manusia; (c) kecintaan pada tanah air dan bangsa; (d) kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan; (e) tolong-menolong; (f) bertanggung jawab dan dapat dipercaya; (g) jernih dalam berpikir, berkata, dan berbuat; (h) hemat, cermat, dan bersahaja; dan (i) rajin dan terampil (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010). Isi Pasal (8) tersebut menegaskan maknabahwa salah satu nilai dan kecakapan yang dikembangkan dalam Gerakan Pramuka adalah nilai kecintaan pada tanah air dan bangsa, atau yang lazimnya diistilahkan dengan nasionalisme.

Terbitnya UU Pramuka, sekaligus sebagai momentum pelaksanaan atau implementasi Kurikulum Pendidikan 2013, mewajibkan seluruh siswa di setiap satuan atau jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP dan SMA harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Terkait dengan hal tersebut, secara otomatis disetiap sekolah juga dibentuk Gugus Depan (Gudep) Pramuka. Hal tersebut menyiratkan makna bahwa gairah untuk menjadikan pramuka sebagai kegiatan pilihan utama bagi generasi muda akan semakin tinggi, apalagi mengingat kegiatan Pramuka tidak hanya bergerak di Gudep yang berpangkalan di sekolah, melainkan juga berpangkalan di satuan komunitas. Untuk itu, upaya pencermatan terhadap dinamika implementasi pendidikan kepramukaan, khususnya terkait dengan pengonstruksian model pendidikan kepramukaan yang lebih bermakna bagi pengembangan nilai-nilai pembangun kompetensi yang utuh pada Praja Pramuka penting untuk dilaksanakan.

Penelitian ini mengkaji implementasi pendidikan kepramukaan di jenjang SMA, khususnya pada tingkat *Penegak Bantara* sebagai subjek kajiannya. *Penegak Bantara* merupakan sebutan untuk tingkat pendidikan Pramuka anak usia

**Budiono, 2018**

**KONSTRUKSI PENDIDIKAN PRAMUKA BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MENGEMBANGKAN SIKAP NASIONALISME**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

16 – 20 tahun. Pada usia tersebut, anak dikategorikan mengemban tugas usia remaja yang ditandai dengan perkembangan emosi yang cenderung sensitif dan reaktif terhadap situasi sosial, menunjukkan karakter psikologis ingin menunjukkan jati diri, emosi yang cenderung bersifat negatif dan temperamental, mudah tersinggung atau marah, atau mudah sedih atau murung, suka kebebasan, tidak mau banyak diatur, acuh tak acuh, dan kurang menunjukkan kepedulian terhadap sekitar. Kondisi tersebut jika kurang diperhatikan, dikhawatirkan akan membahayakan kelangsungan masa depan bangsa dan negara, karena memungkinkan pudarnya nilai nasionalisme di kalangan generasi muda. Untuk itu, kebijakan menjadikan pendidikan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib, termasuk di tingkat SMA tentunya relevan dengan upaya membangun semangat kebangsaan atau patriotisme dan nasionalisme di kalangan generasi muda.

Hasil observasi awal tentang keberadaan *Pramuka Penegak Bantara* di Gudep-gudep pangkalan sekolah di jenjang SMA menggambarkan realitas bahwa sebelum diberlakukannya kurikulum 2013, ekstrakurikuler Pramuka merupakan ekstrakurikuler pilihan. Oleh karena itu, tidak secara keseluruhan SMA di Kota Malang memberlakukan ekstrakurikuler Pramuka sebagai salah satu program kegiatannya. Beberapa sekolah mewajibkan ekstrakurikuler Pramuka hanya untuk siswa kelas X atau hanya untuk kelas X dan XI. Pada umumnya sekolah tidak mewajibkannya untuk siswa kelas XII karena alasan fokus atau dikonsentrasikan untuk menghadapi ujian akhir.

Salah satu klausul dalam Kurikulum 2013 menegaskan bahwa ekstrakurikuler Pramuka wajib diselenggarakan di semua jenjang pendidikan termasuk di jenjang SMA. Sebagai konsekuensi diberlakukannya ekstrakurikuler wajib tersebut, secara otomatis sekolah-sekolah menengah atas (SMA) di kota Malang berupaya mendirikan Gugus Depan (Gudep) baru. Realitas yang ada, pada umumnya ekstrakurikuler kepramukaan cenderung minim peminat, di samping juga kekurangan tenaga pembina. Kegiatan pramuka cenderung dinilai kurang menarik karena dominan dinilai sebagai sebuah rutinitas, di samping kurangnya penanganan secara kreatif. Untuk itu, penting artinya adanya rancangan

**Budiono, 2018**

**KONSTRUKSI PENDIDIKAN PRAMUKA BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MENGEMBANGKAN SIKAP NASIONALISME**

pelaksanaan pendidikan kepramukaan yang tepat, menarik, dan bermakna guna menanamkan nilai-nilai kepramukaan yang telah ditargetkan, termasuk nilai kecintaan pada tanah air dan bangsa yang refleksinya berupa nilai patriotisme dan nasionalisme.

Disebutkan dalam Undang-undang No.12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka Bab III pasal 10 ayat (1),(2), dan (3) bahwa metode kepramukaan menggunakan *sistem amongdan* prinsip kepemimpinan yang tampak merujuk pada filosofi *ing ngarso sung tuladha, ing madyo mangun karsa, tut wuri handayani*. Secara implicit hal tersebut dapat dimaknai bahwa terdapat ruang untuk mengembangkan pendidikan kepramukaan dengan memanfaatkan kearifan lokal atau sumber budaya lainnya, sebagaimana tertuang pada AD/ART Kepramukaan pasal 11 tentang penggunaan kiasan dasar yang bersumber dari sejarah perjuangan dan budaya bangsa dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Terkait dengan hal tersebut, pencermatan terhadap orientasi, sistem, metode, ataupun materi implementasi pendidikan kepramukaan, yang dilaksanakan dalam penelitian ini akan menjadi dasar guna menemu kenali mutan nilai-nilai nasionalisme yang teridentifikasi sebagai kearifan lokal yang melalui pelaksanaan pendidikan kepramukaan dalam mewujudkan atau mencetak generasi yang lebih unggul dan berkarakter.

Dalam upaya penanaman nilai nasionalisme, beberapa hal yang patut dicermati mencakup (1) pemahaman pembina Pramuka dalam menjabarkan nilai-nilai dasar sesuai isi Pasal 8 dalam AD/ART Gerakan Pramuka;(2) relevansi penggunaan model pendidikan dengan nilai dasar dan kecakapan yang ditargetkan; (3) ketepatan pengembangan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik dengan kecakapan yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan AD/ART tentang kepramukaan, dan 4) pemanfaatan nilai-nilai budaya lokal sebagai dasar pengembangan nilai-nilai pada materi yang dikembangkan. Hal tersebut, menyiratkan makna arti penting perencanaan materi dasar pengembangan materi nasionalisme, khususnya materi dengan muatan nilai-nilai budaya lokal.

**Budiono, 2018**

**KONSTRUKSI PENDIDIKAN PRAMUKA BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MENGEMBANGKAN SIKAP NASIONALISME**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pentingnya pengembangan materi pendidikan dengan muatan nilai-nilai budaya lokal didasari oleh beberapa alasan, yakni semakin terkikisnya nilai-nilai kebangsaan sehingga menyebabkan lunturnya identitas kebangsaan dikalangan pelajar diberbagai tingkat pendidikan. Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan, munculnya fenomena sekolah berstandar internasional, berbahasa pengantar bahasa asing, yang potensial mengakibatkan siswa menjadi lebih bangga berbahasa asing, lupa dengan bahasa daerah atau bahkan bahasa nasional atau bahasa Indonesiannya. Dari sudut siswa, dominan muncul fenomena siswa lebih bangga dengan hasil budaya asing daripada budaya bangsa sendiri, lebih bangga memakai produk-produk impor dari luar negeri dibandingkan produk lokal karya bangsa sendiri. Nilai-nilai budaya lokal atau kearifan lokal setempat hakikatnya difungsikan sebagai filter terhadap nilai-nilai dari luar akibat pengaruh globalisasi yang tidak relevan dengan karakter budaya bangsa.

Dalam kondisi yang demikian, tentunya perlu adanya pengkajian tentang nilai-nilai budaya lokal atau kearifan lokal yang relevan untuk diintegrasikan guna menanamkan nilai-nilai nasionalisme kepada siswa melalui proses pembelajaran di sekolah, khususnya melalui pendidikan kepramukaan. Alwasilah (2008) menjelaskan arti penting kearifan lokal sebagai basis pendidikan dan pembudayaan. Ditegaskannya bahwa pengetahuan atau kearifan lokal (*local knowlwdge* atau *local wisdom*) merupakan sumber inovasi dan keterampilan yang dapat diberdayakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam pandangan Alwasilah (2008), kearifan lokal dimaknai sebagai koleksi fakta, konsep, kepercayaan, dan persepsi masyarakat ihwal dunia sekitar. Secara substansial, kearifan lokal dijelaskan sebagai nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah laku sehari-hari masyarakat setempat. Geertz mengatakan bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Dalam kearifan lokal terkandung elemen kecerdasan, kreativitas, dan pengetahuan lokal dari para elit dan masyarakat, yang

**Budiono, 2018**

**KONSTRUKSI PENDIDIKAN PRAMUKA BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MENGEMBANGKAN SIKAP NASIONALISME**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

turut menentukan arah dalam pembangunan peradaban masyarakat (Amirudin, 2005).

Dalam konteks pembangunan bangsa, mengingat begitu penting dan strategisnya nilai kearifan lokal yang hidup di dalam masyarakat dan budaya setempat. Untuk itu, sangat wajar apabila dalam penelitian ini nilai-nilai kearifan lokal diberdayakan dan dielaborasi dalam upaya penanaman nilai nasionalisme. Seiring dengan derasnya arus globalisasi yang dibarengi dengan kemajuan teknologi bidang informasi dan komunikasi disinyalir akan berdampak pada menurunnya rasa nasionalisme. Untuk itu, berbagai upaya untuk menguatkan kembali rasa nasionalisme khususnya dikalangan generasi muda atau siswa harus terus menerus dilakukan. Pengembangan sikap nasionalisme, baik melalui pendidikan formal maupun non formal perlu segera dilakukan agar integritas bangsa Indonesia tetap terjaga dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penelitian dengan fokus tentang penanaman sikap nasionalisme telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Heru Yusgianto (2013) dalam penelitiannya yang berjudul *Strategi Peningkatan Wawasan Kebangsaan Melalui Pemutaran Lagu-lagu Kebangsaan dalam Rangka Menanamkan Sikap Nasionalisme pada Siswa SMA Negeri 1 Boyolali* menyimpulkan bahwa pemutaran lagu-lagu perjuangan Indonesia mempengaruhi sikap nasionalisme pada diri siswa. Karena terbiasa mendengar, sehingga tahu liriknya, siswa menjadi hafal dan dapat menyanyikannya. Dengan demikian siswa pada akhirnya dapat memahami dan menghayati lirik lagu perjuangan. Refleksinya muncul dalam beragam bentuk sikap yang mengindikasikan bahwa dalam diri siswa SMA Negeri 1 Boyolali telah tertanam karakter semangat kebangsaan (nasionalisme), yang indikatornya tampak dalam keaktifan dan sikap tertib dan disiplin saat mengikuti upacara bendera tiap hari Senin dan setiap tanggal 17, dan saat memperingati hari-hari besar nasional, sikap selalu berupaya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, aktif mengikuti dan terlibat dalam kegiatan organisasi, dan menunjukkan sikap bangga akan keanekaragaman bangsa Indonesia.

**Budiono, 2018**

**KONSTRUKSI PENDIDIKAN PRAMUKA BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MENGEMBANGKAN SIKAP NASIONALISME**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Penelitian dengan fokus pengembangan sikap nasionalisme juga dilakukan oleh Sundari (2009) dalam penelitian yang berjudul *Hubungan Antara Faktor Guru, Lingkungan dan Siswa dengan Sikap Nasionalisme di Kalangan Pelajar SMA (Suatu Studi Tentang Peran Pembelajaran PKn untuk Menumbuhkan Sikap Nasionalisme)*. Simpulan penelitian tersebut adalah (1) terdapat hubungan yang cukup kuat dan signifikan antara sikap nasionalisme siswa dan kompetensi guru dalam menumbuhkan sikap nasionalisme siswa melalui pembelajaran PKn di Kabupaten Musi Banyuasin; (2) terdapat hubungan yang cukup kuat dan signifikan antara lingkungan sekolah dan kondisi demografis siswa dalam menumbuhkan sikap nasionalisme siswa melalui proses pembelajaran PKn di Kabupaten Musi Banyuasin; (3) terdapat hubungan yang cukup kuat dan signifikan antara sikap nasionalisme siswa dengan kemampuan siswa dalam proses pembelajaran PKn untuk menumbuhkan sikap nasionalisme siswa di Kabupaten Musi Banyuasin; (4) terdapat hubungan yang cukup kuat dan signifikan antara variabel sikap nasionalisme siswa dengan faktor demografis dalam menumbuhkan sikap nasionalisme melalui proses pembelajaran PKn untuk siswa di Kabupaten Musi Banyuasin; dan (5) terdapat hubungan antara faktor kompetensi guru dalam pembelajaran, faktor lingkungan sekolah, faktor kemampuan siswa dalam pembelajaran, dan faktor demografis siswa dengan sikap nasionalisme siswa di Kabupaten Musi Banyuasin.

Di samping penelitian tersebut, penelitian terkait pengembangan model pendidikan kepramukaan dilakukan Andy Usman (2011), yang meneliti *Pengembangan Model Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan dengan Nilai Dasa Darma Pramuka Berbasis Sistem Among untuk Membentuk Karakter Bangsa (Studi Kasus pada Gugus Depan Mujahidin Kota Pontianak)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) upaya membangun nilai-nilai Dasa Darma Pramuka yang berbasis sistem *among* dalam membangun karakter bangsa memerlukan adanya orientasi untuk membangun dari segi internal organisasi gerakan Pramuka. Kondisi objektif implementasi pendidikan dan pelatihan (Diklat) kepramukaan disekolah-sekolah dinilai belum menunjukkan hasil yang

**Budiono, 2018**

**KONSTRUKSI PENDIDIKAN PRAMUKA BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MENGEMBANGKAN SIKAP NASIONALISME**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

memuaskan. Hal tersebut terjadi karena faktor penggalan nilai-nilai *Dasa Darma* yang berbasis sistem *among* belum sepenuhnya dihayati oleh pembina Pramuka. Dari segi eksternal, hasil penelitian menunjukkan sudah adanya kemauan kuat dari pemerintah agar Gerakan Pramuka berperan lebih aktif dalam membantu pembinaan generasi muda, yang diindikasikan dengan disahkannya AD/ART oleh Presiden No. 24 tahun 2009 dan lahirnya Undang-Undang Gerakan Pramuka No. 12 tahun 2010, yang secara struktural mengatur kedudukan Presiden sebagai Ketua Majelis Pembimbing Nasional Pramuka tertinggi. Namun demikian, implementasi di lapangan belum menunjukkan hasil yang optimal. Penelitian juga menunjukkan temuan bahwa pengembangan model diklat Pramuka Penggalang berbasis sistem *among*, berdasarkan uji kelayakan di lapangan menunjukkan bahwa produk tersebut dinilai efektif untuk dilaksanakan di gugus depan yang berpangkalan di sekolah maupun di komunitas atau wilayah.

Fajarwati (2014) meneliti tentang *Upaya Membangun Sikap Nasionalisme Siswa Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka di Smp Negeri 1 Watulimo Kabupaten Trenggalek*. Hasil temuan menunjukkan bahwa (a) secara organisatoris, dalam ekstrakurikuler kepramukaan beberapa pihak yang berperan dalam membangun sikap nasionalisme mencakup kepala sekolah sebagai Kamabigus, guru pembimbing sebagai pembina gugus depan, pembantu pembina gugus depan, dewan penggalang, dan anggota ekstrakurikuler Pramuka. Implementasi kegiatan ekstrakurikuler, diprogramkan dimusyawarahkan oleh dewan penggalang bersama pembina gugus depan dan pembantu gugus depan. (b) Hasil musyawarah menetapkan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dilaksanakan setiap Sabtu, pukul 13.00-16.00 se usai pulang sekolah, dengan program kegiatan meliputi latihan rutin yang berisi materi kepramukaan, jelajah alam dan peta pita, *outbond*, pelantikan anggota dewan penggalang, bakti sosial, pramuka peduli lingkungan. Pelaksanaan program penanaman sikap nasionalisme mengacu pada program tahunan dan program semester kepramukaan sesuai dengan program yang telah dirancang. Pencapaian tujuan dilaksanakan dengan strategi mengemas kegiatan

**Budiono, 2018**

**KONSTRUKSI PENDIDIKAN PRAMUKA BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MENGEMBANGKAN SIKAP NASIONALISME**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sem menarik mungkin agar siswa tidak jenuh, di samping melalui pembiasaan kegiatan apel sebelum dan setelah melaksanakan kegiatan pramuka.

Kegiatan ekstrakurikuler memberikan pengaruh terhadap pembentukan karakter dan sikap siswa, karena pramuka tidak hanya memberikan ilmu secara teoretis, namun juga bekal aplikatif untuk kehidupan sehari-hari. Upaya yang dikembangkan yakni dengan menciptakan kegiatan inovasi yang dikemas secara menarik. Koordinasi dengan kwartir cabang juga dilakukan dalam upaya mencari informasi tentang kegiatan-kegiatan baru, selain itu kerjasama dengan pihak-pihak luar yang terkait dengan kegiatan kepramukaan secara terprogram seperti dengan pihak pariwisata dan gugus depan lain, serta mengikutsertakan siswa dalam kegiatan perlombaan dan jambore. (c) Kendala dalam pelaksanaan program ekstrakurikuler pramuka timbul karena beberapa faktor, baik internal maupun eksternal, yang meliputi kurangnya minat dan motivasi siswa, jadwal kegiatan yang saling berbenturan antara kegiatan ekstrakurikuler yang satu dengan yang lain, metode penyampaian materi oleh pembina pramuka yang terkesan monoton, kurangnya dukungan dari sekolah, dan tanggapan masyarakat yang kurang positif terhadap pramuka. (d) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam kegiatan pramuka guna membangun sikap nasionalisme siswa adalah pembina pramuka dan guru berupaya membangun minat dan motivasi siswa dengan melakukan pendekatan dan masukan, mengoptimalkan potensi pembina dengan memilih pembina pramuka yang kompeten dibidangnya, pihak sekolah berusaha menjadwalkan setiap kegiatan ekstrakurikuler sehingga waktu pelaksanaannya tidak berbenturan.

Nainggolan (2016) dalam penelitian yang berjudul *Peranan Kepramukaan dalam Membina Sikap Nasionalisme pada Gugus Melati Banda Aceh*, berupaya menggambarkan peranan kepramukaan dalam membina sikap nasionalisme siswa, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepramukaan dinilai memiliki andil dalam membina sikap nasionalisme siswa di sekolah dasar. Dari delapan informan yang sebanyak 91 frekuensi (56,9%) menjawab sangat setuju dan 69 frekuensi (43,1%) menjawab setuju. Hasil penelitian juga menggambarkan bahwa

**Budiono, 2018**  
*KONSTRUKSI PENDIDIKAN PRAMUKA BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MENGEMBANGKAN SIKAP NASIONALISME*

guru berperan dalam meningkatkan rasa nasionalisme padadiri siswamelalui kegiatan kepramukaan. Pada konteks tersebut, Gerakan Pramuka didudukkan sebagai pendidikan non formal yang ada di sekolah, yang sangat penting untuk diberikan dengantujuan meningkatkan kualitas sumber daya kaum muda Indonesia serta mewujudkan peningkatkan rasa nasionalisme generasi muda, khususnya bagi para siswa, yang pada era globalisasi saat ini dinilai telah memudar. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Gerakan pramuka dalam melaksanakan fungsinya sebagai wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda Indonesia mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu mengisi kemerdekaan nasional dan membangun dunia yang lebih baik. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut tentu memerlukan suatu perencanaan dan program yang strategi dan berkesinambungan berupa kebijakan dan prioritas program yang dituangkan dalam gerakan pramuka.

Gerakan pramuka sebagai wahana pembangunan kepribadian ditujukan untuk mengembangkan potensi diri serta akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup bagi setiap warganegara demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pengembangan potensi diri sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam berbagai upaya penyelenggaraan pendidikan, antara lain melalui gerakan pramuka. Gerakan pramuka selaku penyelenggara pendidikan kepramukaan mempunyai peran besar dalam pembentukan kepribadian generasi muda agar memiliki pengendalian diri dan kecakapan hidup untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan sedikit kesamaan dengan penelitian *Konstruksi Pendidikan Pramuka Berbasis Kearifan Lokal untuk Mengembangkan Sikap Nasionalisme (Studi Pendidikan Pramuka dalam PKn di SMA Kota Malang)* yang akan peneliti lakukan. Kesamaan yang dimaksud hanya pada objek kajian yang membahas tentang penanaman sikap nasionalisme dan pendidikan kepramukaan. Namun demikian, persamaan tersebut juga **Budiono, 2018**

**KONSTRUKSI PENDIDIKAN PRAMUKA BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MENGEMBANGKAN SIKAP NASIONALISME**

menggambarkan arah kajian yang berbeda, fokus kepramukaan yang diteliti dominan ke arah memotret penyelenggaraan pendidikan kepramukaan, menelaah keterkaitan komponen kepramukaan dengan penanaman sikap nasionalisme, dan penawaran model atau strategi penanaman sikap nasionalisme hanya dengan satu strategi tertentu.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian *Konstruksi Pendidikan Pramuka Berbasis Kearifan Lokal untuk Mengembangkan Sikap Nasionalisme* ini tidak hanya menggambarkan realitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sebagai sebuah potret, melainkan juga menawarkan materi implementatif untuk menanamkan nasionalisme di kalangan siswa SMA di Malang. Materi yang ditawarkan digali dari nilai-nilai kearifan lokal yang peneliti nilai relevan dengan sikap nasionalisme yang akan dikembangkan. Nilai kearifan lokal yang dielaborasi digali dari nilai-nilai budaya Jawa yang masih relevan untuk dielaborasi dengan materi pendidikan kepramukaan guna mengembangkan sikap nasionalisme pada siswa. Nilai-nilai kearifan lokal Jawa yang dimanfaatkan sebagai basis materi pendidikan kepramukaan hakikatnya merupakan salah satu materi yang relevan untuk menanamkan sikap nasionalisme sebagai bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Bertolak dari paparan latar belakang masalah di atas, perlu adanya pengkajian terhadap keberadaan Pendidikan Kepramukaan sebagai ekstra kurikuler wajib. Terkait dengan pernyataan tersebut, sekolah sebagai institusi pendidikan berperan penting dan bertanggungjawab untuk mempersiapkan proses pembelajaran yang dapat menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air atau nasionalisme agar peserta didik memiliki semangat yang kuat untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara eksplisit, pelaksanaan pengembangan nilai nasionalisme diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam penjelasan pasal 37 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pendidikan

**Budiono, 2018**

*KONSTRUKSI PENDIDIKAN PRAMUKA BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MENGEMBANGKAN SIKAP NASIONALISME*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kewarganegaraan dimaksudkan untuk menjadikan peserta didik sebagai manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Oleh karena itu, proses pembelajaran PKn bukan saja mengajarkan teori dan konsep, melainkan juga fokus pada pembentukan jati diri bangsa Indonesia. Dalam realitasnya, penanaman dan pengembangan nilai nasionalisme tidak hanya diajarkan melalui mata pelajaran PKn, tetapi juga mata pelajaran lain yang relevan, salah satunya melalui pendidikan kepramukaan.

Pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan hakikatnya dikembangkan dari akar dan nilai budaya yang potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan guna lebih menyempurnakan pelaksanaannya dan pencapaian orientasinya, khususnya terkait dengan penanaman nilai-nilai nasionalisme pada generasi muda

Pemikiran tersebut mendasari perlunya dilaksanakannya penelitian tentang pendidikan kepramukaan, khususnya terkait dengan pengembangan model pendidikan kepramukaan yang berbasis kearifan lokal yang secara spesifik mengangkat kearifan lokal Jawa yang ada di sekitar wilayah Malang. Hal tersebut tidak dimaksudkan untuk mempersempit kajian pendidikan kepramukaan, bahkan sebaliknya pengembangan konsep model tersebut diharapkan dapat menjadi model alternatif yang akan memperkaya model kepramukaan yang sudah ada dengan tetap memperhatikan amanat Undang-Undang dalam rangka mengembangkan sikap nasionalisme melalui pendidikan ekstrakurikuler. Hal tersebut perlu dilakukan dalam rangka mendukung pengembangan sikap nasionalisme melalui pendidikan intrakurikuler yang secara materi dikemas dalam bidang studi atau mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), sedangkan dalam ekstrakurikuler dikemas melalui Pendidikan Kepramukaan.

Berdasarkan pengamatan terhadap implementasi pendidikan kepramukaan yang ada dan beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah peneliti laksanakan, maka peneliti menilai adanya permasalahan dalam penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagai representasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam memerankan fungsi sebagai wahana penanaman sikap nasionalisme berbasis kearifan lokal. Untuk itu perlu adanya pengkajian dan pemberian solusi

**Budiono, 2018**

*KONSTRUKSI PENDIDIKAN PRAMUKA BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MENGEMBANGKAN SIKAP NASIONALISME*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yang tepat yang dapat berperan dalam mengantarkan bangsa Indonesia ke dalam tatanan cita ideal masyarakat yang berbudaya dan berkeadaban.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan, serta isu tentang rendahnya kualitas pemahaman dan penghayatan generasi muda terhadap nilai nasionalisme, dipandang perlu adanya pemikiran tentang alternatif pengembangan sikap nasionalisme dikalangan pelajar. Pemilihan pendidikan kepramukaan sebagai alternatif wahana strategis penanaman nilai-nilai dan pembentukan sikap nasionalisme didasari alasan bahwa kepramukaan merupakan wadah dan aktivitas organisasi yang telah memiliki struktur yang mapan mulai dari tingkat pusat/nasional hingga tingkat institusi atau sekolah, memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang bersumber pada Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945. Selain itu, kepramukaan juga memiliki landasan operasional dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, yang merupakan langkah maju untuk memerankan Gerakan Pramuka sebagai wahana untuk membina kader bangsa. Berpijak pada realitas tersebut permasalahan dalam penelitian dipaparkan berikut ini.

- 1) Bagaimana bentuk pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan di SMA kota Malang dalam perspektif filosofis dan yuridis?
- 2) Bagaimana konsep nilai-nilai nasionalisme dalam Pendidikan Kepramukaan yang merepresentasikan Pendidikan Kewarganegaraan yang diajarkan di SMA kota Malang?
- 3) Bagaimana konstruksi konsep model kearifan lokal yang bermuatan nasionalisme yang dapat dielaborasi dalam Pendidikan Pramuka di SMA ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah memperoleh konsep model pengembangan nilai nasionalisme berbasis kearifan lokal dalam pendidikan kepramukaan, yang dinilai dapat memberi kontribusi

**Budiono, 2018**

*KONSTRUKSI PENDIDIKAN PRAMUKA BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MENGEMBANGKAN SIKAP NASIONALISME*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

terhadap pengembangan sikap nasionalisme dikalangan pelajar SMA di Kota Malang. Adapun yang akan menjadi dasar pijakan untuk melakukan penelitian ini adanya saling keterkaitan antara nilai kearifan lokal dengan nilai-nilai nasional yang saling mengisi dan melengkapi dan tetap diperlukan di era global dalam rangka mempertahankan jati diri dan identitas bangsa. Oleh karena itu, secara ekspisit tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Mengidentifikasi bentuk Pendidikan Kepramukaan yang selama ini dikembangkan di SMA kota Malang ditinjau dari perspektif filosofis dan yuridis.
- 2) Mendeskripsikan konsep nilai-nilai nasionalisme yang elaboratif dengan Pendidikan Kewarganegaraan yang dikembangkan dalam pendidikan kepramukaan.
- 3) Mengembangkan konsep model konstruksi kearifan lokal yang bermuatan nasionalisme yang dapat dielaborasi dalam Pendidikan Kepramukaan di SMA.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Pengembangan ilmu pengetahuan senantiasa mengarah pada penyesuaian dengan dinamika zaman, di samping juga merupakan solusi terhadap suatu permasalahan dan upaya memenuhi suatu kebutuhan. Demikian pula dengan hasil penelitian ini, meskipun sebelumnya telah ada model pengembangan ekstrakurikuler namun penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan, dibidang pendidikan formal, khususnya pada ekstrakurikuler Pramuka. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah atau lembaga lain dalam perspektif pendidikan formal maupun non formal secara lebih luas dan diharapkan dapat dimanfaatkan dalam lingkungan akademis maupun praktis. Secara umum, manfaat tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang berikut ini.

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, pengembangan model pendidikan kepramukaan dalam pendidikan ekstrakurikuler sekaligus dalam pendidikan formal ini belum banyak

**Budiono, 2018**

*KONSTRUKSI PENDIDIKAN PRAMUKA BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MENGEMBANGKAN SIKAP NASIONALISME*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dikaji oleh para peneliti pendidikan. Berdasarkan Permendiknas 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum, disebutkan bahwa Ekstrakurikuler wajib merupakan program ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik, terkecuali bagi peserta didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkannya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Ekstrakurikuler pilihan merupakan program ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Sejak diberlakukannya Kurikulum 2013 kegiatan kepramukaan merupakan Ekstrakurikuler wajib yang harus dilaksanakan di jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan menengah atas.

Terkait dengan fungsi kegiatan ekstrakurikuler yang mencakup fungsi pengembangan, sosial, rekreatif, dan persiapan karir, yang mencakup masing-masing fungsi berikut ini.

- 1) Fungsi Pengembangan merupakan fungsi kegiatan ekstrakurikuler terkait dengan pengembangan kemampuan dan kreativitas peserta didik sesuai dengan potensi, bakat dan minatnya.
- 2) Fungsi Sosial adalah fungsi kegiatan ekstrakurikuler dalam rangka pengembangan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik.
- 3) Fungsi Rekreatif adalah fungsi kegiatan ekstrakurikuler terkait dengan pengembangan suasana rileks, menggembarakan dan menyenangkan guna menunjang proses kegiatan belajar dan perkembangan belajar peserta didik .
- 4) Fungsi Persiapan karir adalah fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kesiapan karir dan profesionalitas peserta didik.

Hasil penelitian secara teoretis diharapkan dapat relevan dan dapat mengukuhkan keberadaan rumusan fungsi tersebut. Penelitian ini dikembangkan berdasarkan kajian terhadap pendidikan Pramuka yang ada, yang selama ini dikembangkan dengan berbasis Syarat Kecakapan Umum (SKU), sesuai ketetapan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Disisi yang lain, penelitian ini berupaya mengembangkan model pendidikan dengan orientasi memperkaya model yang ada. Secara teoritis, model pendidikan kepramukaan berbasis kearifan lokal yang dikembangkan, dirancang dengan tidak bertentangan dengan SKU yang ada, **Budiono, 2018**

*KONSTRUKSI PENDIDIKAN PRAMUKA BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MENGEMBANGKAN SIKAP NASIONALISME*

namun dalam beragam aspeknya dirancang dan dikembangkan dengan muatan nilai-nilai kearifan lokal yang relevan. Model yang dikembangkan dimaksudkan guna memperkaya wacana model pendidikan kepramukaan agar lebih efektif, kreatif, menyenangkan, berdayaguna, dan berhasil guna bagi pengembangan siswa nantinya. Pemikiran tersebut didasarkan pada pengembangan kurikulum pendidikan Pramuka yang memberi kesempatan untuk menambah materi dari muatan lokal agar pendidikan Pramuka lebih membumi sesuai dengan konteks lingkungannya.

Meskipun model pendidikan yang dikembangkan berbasis kearifan lokal bukan berarti bersifat primordial, yang hanya dimungkinkan relevan untuk diberlakukan untuk wilayah Jawa saja atau Malang khususnya. Hasil model pengembangan ini diharapkan juga dapat berlaku secara nasional dalam rangka memperkaya khasanah model pendidikan kepramukaan yang sudah ada. Secara eksplisit, nilai kearifan lokal tersirat dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Pasal 10 yang menyebutkan ; (1) Kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan *sistem among*. (2) *Sistem among* merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. (3) *Sistem among* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan:

- a. di depan menjadi teladan;
- b. di tengah membangun kemauan; dan
- c. di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian.

Istilah *sistem among* tersebut jika dikaji lebih jauh merupakan terjemahan dari semboyan Ki Hajar Dewantara, berasal dari bahasa Jawa, yakni : *Ing Ngarso sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani*. Semboyan itu telah diadopsi dalam sistem pendidikan Pramuka yang secara eksplisit termaktub dalam Pasal 10 Undang-Undang Pramuka.

### **1.5.2 Manfaat Praktis.**

**Budiono, 2018**

*KONSTRUKSI PENDIDIKAN PRAMUKA BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MENGEMBANGKAN SIKAP NASIONALISME*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Secara kelembagaan gerakan Pramuka telah memiliki struktur organisasi mulai dari tingkat Nasional (Kwarnas), tingkat Propinsi (Kwartir Daerah), tingkat Kota/Kabupaten (Kwartir Cabang), tingkat kecamatan (Kwartir Ranting) dan tingkat lembaga pendidikan atau yang disebut Gugus Depan (Gudep). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang terkait dengan pendidikan kepramukaan yang antara lain:

1) Bagi Siswa (anggota praja Pramuka)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dalam pendidikan kepramukaan, sehingga siswa dapat mengetahui bahwa kearifan lokal memiliki nilai-nilai yang luhur, bernilai tinggi, dan melekat dengan lingkungan masyarakat, yang hakikatnya potensial dikembangkan untuk membentuk pribadi dan jati diri. Dengan penelitian ini, siswa diharapkan dapat memperoleh pendidikan dan keterampilan yang bersumber dari nilai-nilai masyarakat sekitar dan dapat memanfaatkan potensi yang ada dilingkungannya, sehingga hasilnya dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata.

2) Bagi Pembina Gugus Depan

Model pendidikan kepramukaan berbasis kearifan lokal ini dapat dipakai sebagai alternatif model pembinaan Pramuka di sekolah maupun di lembaga yang terkait dengan binaannya. Model yang dikembangkan dalam penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai alternatif metode pendidikan kepramukaan yang berorientasi pada pengembangan sikap nasionalisme, kepemimpinan dan *tatakrama* yang bersumber dari nilai-nilai *adiluhung* kearifan lokal yang ada. Meskipun berbasis kearifan lokal di lingkungan budaya Jawa, model pendidikan yang dikembangkan tidak dimaksudkan untuk mengembangkan paham primordialisme, melainkan justru untuk memperkuat budaya nasional yang bercorak majemuk menuju terciptanya integrasi nasional yang berdasar pada kebhinekaan.

3) Bagi Kwartir Cabang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai alternatif model pengembangan pendidikan kepramukaan yang diberlakukan di wilayah Kwartir

**Budiono, 2018**

**KONSTRUKSI PENDIDIKAN PRAMUKA BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MENGEMBANGKAN SIKAP NASIONALISME**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Cabang Kota Malang sebagai bentuk model yang memperkaya khasanah model pendidikan kepramukaan yang sudah ada. Manfaat positif model yang telah dikembangkan ini diharapkan dapat diimplementasikan sebagai salah satu solusi bagi pembentukan karakter praja yang berciri budaya, termasuk di dalamnya praja pramuka dari tingkat pelajar SMA kota Malang dilingkungan binaan Kwarda Kota Malang dan Malang Raya. Diharapkan juga nantinya model yang dikembangkan ini dapat diadopsi dan diterapkan secara nasional.

## **1.6 Definisi Istilah**

### **1) Konstruksi**

Dalam konteks penelitian ini yang dimaksud konstruksi adalah susunan atau model yang dirancang dan dikembangkan dengan caradon untuk orientasi tertentu. Adapun yang dimaksud *Konstruksi Pendidikan Pramuka* dalam penelitian ini adalah konsep model rancangan materi pendidikan kepramukaan untuk menanamkan nasionalisme, yang dirancang dan dikembangkan melalui pengelaborasi nilai-nilai yang secara khas digali dari kearifan lokal yang ada di wilayah Malang. Konsep model yang dikembangkan tersebut tetap relevan dengan ketetapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART Gerakan Pramuka, maupun Syarat Kecakapan Umum (SKU). Materi pendidikan kepramukaan tetap dikembangkan dari SKU, mengingat hakikat keberadaan SKU sebagai alat evaluasi sekaligus sebagai tolok ukur penguasaan materi kenaikan jenjang kompetensi dalam kepramukaan. Selaras dengan hierarki pengembangan materi dalam kepramukaan, konstruksi yang dimaksud dalam konteks penelitian ini berupa penyusunan dan pengembangan materi pendidikan Pramuka tetap mengacu pada Undang-Undang, AD/ART dan SKU secara konsisten agar tujuan pendidikan kepramukaan yang dimaksud dalam Undang dapat tercapai secara optimal.

### **2) Pendidikan Pramuka**

Pendidikan Kepramukaan diartikan sebagai proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia Pramuka melalui penghayatan dan

**Budiono, 2018**

*KONSTRUKSI PENDIDIKAN PRAMUKA BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MENGEMBANGKAN SIKAP NASIONALISME*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Secara kelembagaan, yang dimaksud pendidikan kepramukaan adalah pendidikan pramuka yang berada dibawah naungan Gugus Depan yang ada di sekolah. Secara organisatoris, pendidikan pramuka adalah pendidikan pramuka yang materinya sudah ditetapkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, dan secara operasional di lapangan merupakan pengembangan model pendidikan pramuka yang melibatkan pemberdayaan lingkungan setempat atau kearifan lokal yang ada ( pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010).

### 3) Kearifan lokal

Kearifan lokal atau *local wisdom* dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh masyarakatnya. Dalam disiplin ilmu Antropologi dikenal dengan istilah *local genius*, yang secara substansi identik dengan istilah *local wisdom*. Kearifan lokal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gagasan atau nilai-nilai yang bersifat baik, ‘bijaksana’, dapat dirujuk, dapat dimanfaatkan, yang hakikatnya sudah melekat menjadi ‘budaya’ dan diakui keberadaannya oleh masyarakat pemilik, yakni masyarakat Kota Malang. Nilai-nilai kearifan lokal setempat tersebut secara pedagogik sebagian sudah diadopsi oleh sekolah-sekolah di Kota Malang sebagai muatan materi pembelajaran muatan lokal maupun ekstra kurikuler.

### 4) Sikap Nasionalisme

Istilah nasionalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Sugono (2008) diartikan sebagai paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri; dan politik untuk membela pemerintahan. Sedangkan, sikap nasionalisme diartikan sebagai sikap mencintai dan bangga akan segala sesuatu yang ada di dalamnya (nasionalisme) yang disertai dengan rela berkorban untuk menjaganya. Nasionalisme merupakan suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu diserahkan kepada negara kebangsaan, yang wujudnya berupa dukungan penuh akan keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara. Taufik Abdullah (2001) menyatakan bahwa nasionalisme adalah sebuah cita-cita untuk

**Budiono, 2018**

**KONSTRUKSI PENDIDIKAN PRAMUKA BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MENGEMBANGKAN SIKAP NASIONALISME**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

memberi batas “kita yang berbangsa” dengan mereka dari bangsa lain, antara “negara kita” dan negara mereka. Penegasan tersebut merupakan bentuk jiwa nasionalisme yakni sikap mencintai dan bangga dengan bangsa sendiri dengan tidak merendahkan bangsa lain atau nasionalisme sempit yang diistilahkan *chauvinisme*.

#### 5) Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, Pendidikan Kewarganegaraan dimaknai sebagai nama mata pelajaran wajib untuk kurikulum pendidikan dasar dan menengah dan mata kuliah wajib untuk kurikulum pendidikan tinggi. Penjelasan pasal 37 menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia menurut Winataputra (2008) secara filosofik dan substantif-pedagogis andragogis merupakan pendidikan untuk memfasilitasi perkembangan pribadi peserta didik agar menjadi warga negara yang religius, berkeadaban, berjiwa persatuan Indonesia, demokratis, bertanggungjawab dan berkeadilan, serta mampu hidup secara harmonis dalam konteks multikulturalisme-Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam lingkup intrakurikuler Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran pokok dalam penanaman dan pengembangan sikap nasionalisme, sedang dalam ekstrakurikuler pendidikan pramuka memiliki peran strategis untuk hal tersebut. Secara substantif dalam rangka penanaman dan pengembangan jiwa nasionalisme Pendidikan Kewarganegaraan dan pendidikan pramuka memiliki hubungan komplementer yang saling mendukung dan melengkapi. Dalam praktik pembelajarannya pengembangan materi Pendidikan Kewarganegaraan maupun pendidikan pramuka tidak bisa lepas dengan konteks lingkungan yang ada, agar konsep dan materi yang telah disusun secara nasional dapat dipahami dan dilaksanakan oleh peserta didik sesuai dengan lingkungan sosialnya.

### 1.7 Sistematika Penulisan

**Budiono, 2018**

**KONSTRUKSI PENDIDIKAN PRAMUKA BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MENGEMBANGKAN SIKAP NASIONALISME**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sistematika penulisan Disertasi ini terdiri dari lima bab, Daftar Pustaka dan lampiran-lampiran, secara rinci teruraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menyajikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, manfaat teoritis, manfaat praktis, definisi istilah dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, membahas tentang, hakikat pengembangan sikap nasionalisme, konsep nasionalisme, pengembangan sikap nasionalisme, hakikat pkn sebagai wahana pengembangan nilai nasionalisme, perkembangan pkn di Indonesia, tujuan pkn di Indonesia, hakikat pendidikan kepramukaan, aspek ontologis pendidikan kepramukaan, aspek epistemologis pendidikan kepramukaan, aspek aksiologis pendidikan kepramukaan, landasan yuridis ekstrakurikuler pramuka, sejarah prammuka di Indonesia, pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah, aktualisasi ekstrakurikuler pramuka dalam intrakurikuler, kerifan lokal, definisi kearifan lokal, kearifan lokal tempat peneliitian, teori Gestalt, hukum-hukum belajar gestalt, prinsip-gestalt dalam pembelajaran, teori elaborasi, definisi elaborasi, dan prosedur teori elaborasi

Bab III Metode Penelitian, menyajikan tentang, pendekatan dan metode penelitian, tempat penelitian dan partisipan , teknik pengumpulan data, observasi, interview, dokumentasi, instrumen pengumpuln data, human instrument, field notes, interview, alat perekam data, tahap-tahap penelitian, studi pendahuluan, studi lapangan, perumusan koseptual dan konfirmasi empirik, revisi, validasi hasil dan penemuan konseptual, rumusan konsep modelpendidikan pramuka berbasis kearifan lokal dan teknik analisa data.

Bab IV Temuan dan pembahasan, menyajikan tentang temuan penelitian deskripsi lokasi penelitian, gambaran umum kota malang, bentuk pelaksanaan pendidikan kepramukaan di SMA kota Malang dalam prespektif filosofis dan yuridis, implementasi pendidikan kepramukaan di SMA kota Malang, nilai-nilai kearifan lokal dalam implementasi pendidikan kepramukaan di kota Malang, konsep model pendidikan kepramukaan berbasis kearifan lokal untuk mengembangkan sikap nasionalisme, rumusan KI-KD PKn sebagai rujukan

**Budiono, 2018**

*KONSTRUKSI PENDIDIKAN PRAMUKA BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MENGEMBANGKAN SIKAP NASIONALISME*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penanaman sikap nasionalisme dalam pendidikan kepramukaan, pengembangan indikator kompetensi dasar (KD PKn bermuatan nilai-nilai nasionalisme, butir-butir sku yang diidentifikasi bermuatan nilai-nilai nasionalisme, pencapaian SKU bermuatan nilai-nilai nasionalisme, indikator muatan nilai nasionalisme yang harus dikembangkan dalam kepramukaan, bentuk sikap nasionalisme yang harus dapat dikembangkan melalui pendidikan kepramukaan, indikator sikap nasionalisme dalam kearifan lokal yang relevan dengan sikap nasionalisme dalam kepramukaan, muatan nilai nasionalisme yang harus ada dalam kearifan lokal, konsep model kearifan lokal yang bermuatan nasionalisme yang dapat dielaborasi dalam pendidikan kepramukaan di SMA uji coba terbatas dan uji ahli, prosedur uji coba terbatas, uji ahli, hasil uji ahli, pembahasan, bentuk pelaksanaan pendidikan kepramukaan di sma kota Malang dalam perspektif filosofis dan yuridis, konsep nilai-nilai nasionalisme dalam pendidikan kepramukaan yang merepresentasikan pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan di sma kota malang, dan bentuk kearifan lokal yang potensial dielaborasi dalam materi pendidikan kepramukaan

Bab V, Kesimpulan, implikasi dan rekomendasi, menyajikan tentang kesimpulan, implikasi dan rekomendasi, rekomendasi kepada pengambil kebijakan, rekomendasi kepada praktisi dan rekomendasi kepada peneliti selanjutnya.

Pada akhir disertasi ini dilengkapi dengan daftar pustaka, data dokumentasi serta lampiran-lampiran yang terkait dengan penelitian ini.

**Budiono, 2018**

*KONSTRUKSI PENDIDIKAN PRAMUKA BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MENGEMBANGKAN SIKAP NASIONALISME*

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)